

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, hasil penelitian yang sudah ada digunakan sebagai perbandingan dan kajian dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian yang dijadikan sebagai perbandingan yang tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Adapun penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis yaitu, oleh Muhammad Erwin Dianto (2015) yang berjudul “ Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” dan Reni Bandari Abdi (2014) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan”.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Erwin Dianto yang berjudul “ Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian tersebut berisi kutipan-kutipan dari data-data. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumentasi pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Dari hasil penelitian diatas dapat penulis pahami bahwa Program Kota Layak Anak di desa Sendangtirto dilaksanakan atas dasar proporsi jumlah anak yang tidak dapat diabaikan. Tujuan yang dilakukan adalah untuk mewadahi dan menjadikan tempat berkreasi dan berprestasi anak-anak. Faktor lain yang diperhatikan adalah permasalahan anak-anak yang kerap terjadi di desa tersebut. Implementasi program KLA di desa Sendangtirto dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Tahap interpretasi ialah kegiatan sosialisasi program KLA yang dilakukan dilingkungan kabupaten, kecamatan dan desa. Tahap pengorganisasian ialah kegiatan penetapan pelaksanaan program, standar prosedur operasional (SOP), sumber daya keuangan dan peralatan, manajemen pelaksanaan program, dan jadwal pelaksanaan program. Sedangkan untuk tahap aplikasi program KLA yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sendangtirto dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada, mencakup kader PKK desa Sendangtirto, Kader Posyandu, Guru PAUD, Karang Taruna, Dunia Usaha, LSM dan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dan mensosialisasikan pemenuhan hak-hak. Pada penelitian ini, peneliti terfokus pada bentuk penerapan kota layak anak di Desa Sendangtirto dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terlaksanakannya kota layaka anak di Desa Sendangtirto.

Penelitian yang kedua oleh Reni Bandari Abdi (2014) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan” menggunakan metode penelitian

kualitatif deskriptif karena bermaksud untuk mendeskripsikan hal-hal terkait implementasi kebijakan kota layak anak di Tangerang Selatan, guna memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Reni Bandari Abdi (2014) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan” dapat disimpulkan bahwa pemenuhan klaster hak anak yang paling baik dalam implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan konvensi hak anak adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, terlihat dari banyaknya jumlah fasilitas menyusui atau pojok ASI, tingginya presentasi imunisasi dasar lengkap bagi anak, rendahnya prevalensi gizi buruk pada balita, rendahnya angka kematian bayi, serta aktif dan berprestasinya PIK KRR (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja) sebagai lembaga kesehatan reproduksi dan mental bagi anak di Kota Tangerang Selatan. Pada penelitian ini, peneliti terfokus pada bentuk implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak pada kelima klaster yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Konsep Implementasi Program Malang Kota Layak Anak dalam pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka implementasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah di buat karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna darisisi perancang dan rancangan itu. Maka implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-sian antara rancangan dengan implementasi. Rancangan kurikulum dan implementasi kurikulum adalah sebuah sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya (konsep linearitas) dalam arti implementasi

mencerminkan rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman gurusewa aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai intikurikulum untuk memahami perancangan kuirkulum dengan baik dan benar (<https://kbbi.web.id/implementasi>) .

Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pengertian Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat , keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan , program dan kegiatan untuk pemenuhan hak hak anak. Dengan kata lain, KLA adalah kota yang dibangun berdasarkan prinsip pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan (<http://makola.malangkota.go.id>). Kota Layak Anak dilakukan oleh pemerintah karena Jumlah anak adalah

sekitar sepertiga dari jumlah penduduk, anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa, maka anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan dan setiap anak memiliki hak yang sama dan dalam pemenuhan hak anak, mereka diperlukan penguatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan agar lebih terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

a. Tujuan Umum Kota Layak Anak

Untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten / Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the rights of Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan , dalam bentuk Kebijakan, Kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak hak anak pada suatu wilayah kabupaten / kota.

b. Tujuan Khusus Kota Layak Anak

Meningkatkan Komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kab/kota dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik anak, mengintegrasikan potensi sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang ada di kab/kot dalam memenuhi hak hak anak, mengimplementasikan kebijakan kelangsungan hidup,tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak melalui

perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kab/kot secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA dan memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten Kab/Kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak.

Guna mewujudkan Kota Layak Anak dalam sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usahayang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam semua bidang pembangunan dibuat standart 31 indikator KLA sesuai peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 yang dibagi 5 klaster yang dijabarkan menjadi 31 indikator, akan tetapi pada tahun 2017 telah disimpulkan menjadi 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai berikut :

c. Indikator Penguatan Kelembagaan meliputi :

- (1) Perda Kota Layak Anak
- (2) Terlembaga Kota Layak Anak
- (3) Keterlibatan Masyarakat, dunia usaha dan media massa

Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan

- (4) Registrasi anak
- (5) Informasi layak anak

(6) Partisipasi anak

Klaster 2 : Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

(7) Perkawinan anak

(8) Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak

(9) Lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi

(10) Infrastruktur ramah anak

Klaster 3: Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

(11) Persalinan difasilitasi kesehatan

(12) Pravelensi gizi

(13) Pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA)

(14) Akses dan pelayanan ramah anak

(15) Air minum dan sanitasi

(16) Kawasan tanpa rokok

Klaster 4: Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

(17) PAUD Holistik integratif

(18) Presentase Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun

(19) Presentase sekolah ramah anak (SRA)

(20) Pusat kreatif anak (PKA)

Klaster 5: Hak Perlindungan Khusus

- (21) Korban kekerasan dan eksploitasi
- (22) Korban pornografi dan situasi darurat
- (23) Penyandang disabilitas
- (24) ABH (anak berhadapan dengan hukum), terorisme dan stigma

d. Prinsip Kota Layak Anak

- (1) Non diskriminasi
- (2) Kepentingan yang terbaik untuk anak
- (3) Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- (4) Penghargaan terhadap pendapat anak

e. Strategi Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak kedalam :

- (1) Setiap proses penyusunan : kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Setiap tahapan pembangunan : perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Setiap tingkatan wilayah : nasional, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.

f. Ruang Lingkup Kota Layak Anak

Meliputi seluruh bidang pembangunan yang dikelompokkan kedalam :

- (1) Tumbuh kembang anak
- (2) Perlindungan anak

g. Pendekatan Pengembangan Kota Layak Anak

Merujuk pada pengalaman implementasi Kota Layak Anak, pengembangan KLA dan perluasan wilayah percontohan Kota Layak Anak dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- (1) Bottom-up dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan dalam mewujudkan “DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK”, selanjutnya meluas ke kecamatan dalam mewujudkan “KECAMATAN LAYAK ANAK”, dan berujung pada kabupaten/kota dalam mewujudkan “KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK”.
- (2) Top-down : dimulai dengan fasilitas dari tingkat nasional, menuju ke propinsi dan berujung pada kabupaten/kota dalam wujud “KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK”.
- (3) Kombinasi antarabottom-up dan top-dow: sedangkan perluasan cakupan wilayah percontohan Kota Layak Anak dapat dilakukan melalui pendekatan, yaitu:
 - Replikasi internal
 - Replikasi eksternal

h. Komitmen Internasional

Terdapat bidang pokok yang mendapatkan perhatian khusus dalam deklarasi *World Fit for Children (WFC)* yaitu Promosi hidup sehat, penyediaan pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan, dan

penanggulangan HIV/AIDS. WFC juga menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak yaitu :

- (1) Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) Membasmi kemiskinan;
- (3) Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal;
- (4) Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak;
- (5) Memberikan pendidikan bagi semua anak;
- (6) Melindungi anak dari segala bahaya dan eksploitasi;
- (7) Melindungi anak dari peperangan;
- (8) Memberantas HIV dan AIDS;
- (9) Mendengarkan anak dan pastikan anak berpartisipasi; dan
- (10) Melindungi bumi (sumber daya alam) untuk kepentingan anak.

Convention on the Right of the Child (CRC), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menekankan hak-hak dasar anak, yaitu Hak atas kelangsungan hidup, Hak untuk tumbuh dan berkembang, Hak atas perlindungan dan Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Millenium Development Goals (MDGs) yang menekankan 8 tujuan, yaitu menghapus kemiskinan, memastikan pendidikan dasar untuk laki-laki dan perempuan, mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu hamil, memerangi HIV/AIDS,

menjamin kelangsungan lingkungan hidup dan membangun kemitraan global.

i. Langkah-Langkah Pengembangan Kota Layak Anak

- (1) Komitmen Politis KLA
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA
- (3) Pengumpulan Data Basis KLA
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
- (5) Mobilisasi Sumber Daya Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
- (6) Pemantauan dan Evaluasi KLA
- (7) Pelaporan KLA

j. Inisiasi dan Peran Pemangku Kepentingan Kota Layak Anak

- (1) 2006 : Rancangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diinisiasi oleh KPP.
- (2) 2006 : Percontohan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di 5 Kabupaten/Kota.
- (3) 2007 : Perluasan wilayah percontohan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di 10 Kabupaten/Kota.
- (4) 2009 : Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2009.
- (5) 2010 : Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diamanatkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Program

Pembangunan Prioritas yang mengamanatkan penyusunan 2 (dua) kebijakan:

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Provinsi.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa/Kelurahan.

k. Pihak yang Berperan Mewujudkan Kota Layak Anak

(1) Lembaga Legislatif: Nasional dan Daerah

(2) Lembaga Yudikatif: Nasional dan Daerah

(3) Lembaga Pemerintah:

- Pusat/Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan

(4) Lembaga Masyarakat Peduli/Pemerhati Anak

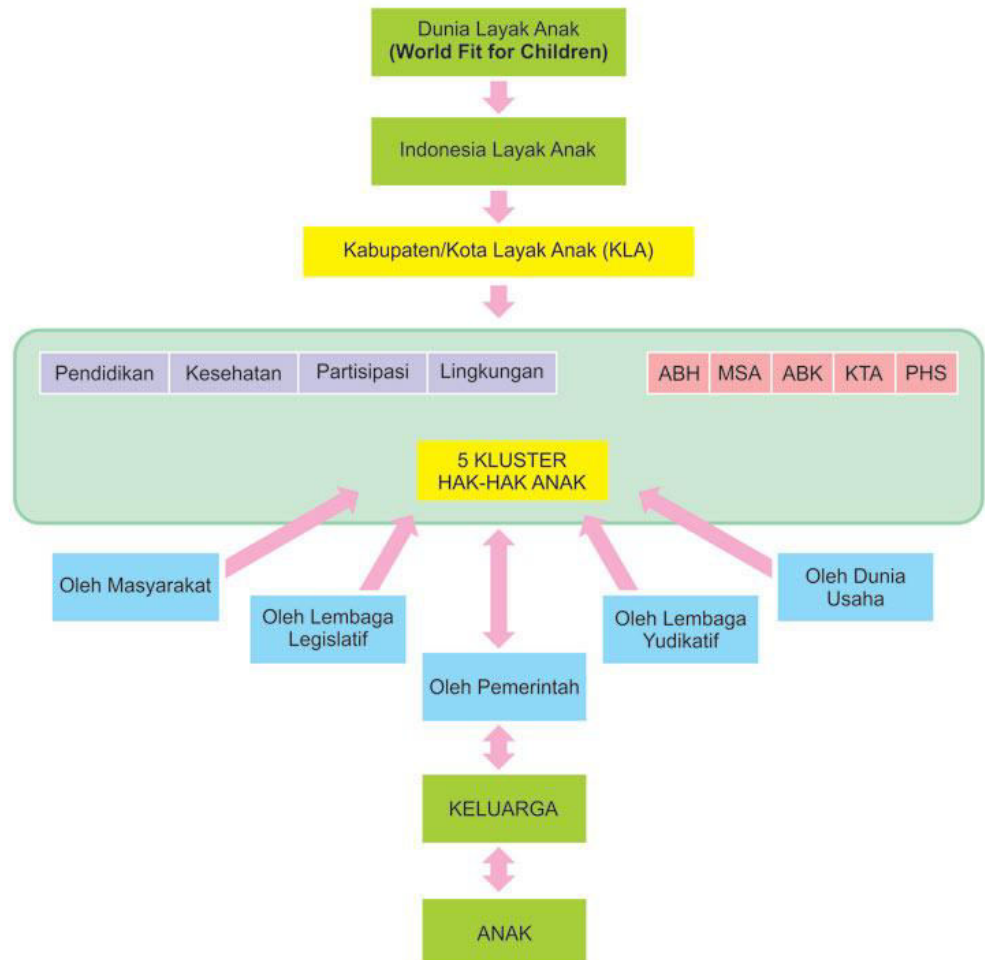
(5) Dunia Usaha

(6) Akademisi

(7) Masyarakat

1. Alur pikir Kota Layak Anak

Bagan 2.1



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia

Keterangan :

ABH : anak berhadapan dengan hukum

MSA : masalah sosial anak

ABK : anak berkebutuhan khusus

KTA : kekerasan terhadap anak

PHS : pemenuhan hak sipil anak

Kluster Hak-Hak Anak:

- a. Hak sipil dan kebebasan
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
- e. Perlindungan khusus

m. Indikator Kelurahan Layak Anak

- (1) Semua persalinan ibu hamil harus tertolong oleh tenaga kesehatan
- (2) Semua anak harus memiliki akte kelahiran
- (3) Semua balita mendapat imunisasi dasar lengkap
- (4) Semua anak mendapat pelayanan kesehatan dasar
- (5) Semua anak harus mendapat pendidikan/sekolah
- (6) Adanya sarana dan taman bermain gratis anak
- (7) Adanya wadah/forum anak kelurahan secara aktif terlibat dalam musrenbang dan kegiatan lainnya
- (8) Adanya sekolah ramah anak dan sekolah inklusi
- (9) Adanya puskesmas/taman posyandu ramah anak
- (10) Adanya rumah cerdas (perpustakaan, internet, ajang kreasi, taman bermain gratis)

- (11) Adanya taman bacaan masyarakat
 - (12) Adanya pojok asi di mall dan fasilitas umum
 - (13) Menurunkan angka kemiskinan ibu dan bayi
- n. Produk Hukum Malang Kota Layak Anak
- (1) Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (akte Kelahiran Gratis)
 - (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan.
 - (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 - (4) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Pelayanan Kekerasan anak dan perempuan
 - (5) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Anjal dan Gepeng
 - (6) Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Penyandang Cacat
 - (7) Ranperda Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Malang

Program Kota Layak Anak yang ada di kota Malang adalah Rekomendasi Forum Anak, Sosialisasi Konvensi Hak Anak, dan Akta Gratis. Berikut ini adalah pemaparan dari beberapa program yang dilakukan, yaitu Renovasi Bangunan Sekolah yang kurang layak, dibangunnya Malang Club Hallroom untuk menampung bakat dan minat pelajar di Kota Malang, memperbanyak Bus Sekolah dan penambahan rute untuk menjangkau sekolah-sekolah terpencil, diadakan sosialisasi jadwal Halte dan Rute Bus Sekolah pembatasan kendaraan bermotor tiap keluarga untuk mengurangi kemacetan,

pembangunan kota yang ramah lingkungan, penghijauan di kawasan perkotaan, adanya Program Pertukaran Pelajar antar daerah, pembangunan Taman Pintar, adanya tayangan edukasi di tempat umum, memperbanyak air siap minum di tempat umum, menambahkan tempat Free Wifi, memperbanyak Taman Baca, program penghentian putus sekolah, optimalisasi pemilah sampah organik dan non organik, mengoptimalkan Program Bank Sampah, mengadakan tes urin untuk mengetahui pengguna narkoba dan rehabilitasi sejak dini, dan menambahkan sarana permainan di Taman Kota.

Terfokus pada Kota Layak Anak klaster 2, kota Malang mempunyai program pendukung dalam menerapkan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagai berikut :

- a. Operasional dan Penampungan Lingkungan Pondok Sosial
- b. Terbentuknya LK3, K2S
- c. Adanya Lembaga Konsultansi Kesejahteraan Sosial
- d. TP-PKK
- e. Jumlah PAUD/Playgroup
- f. Jumlah Penitipan Anak, Pojok ASI
- g. Taman Bermain Gratis,
- h. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kepada Anak Jalanan
- i. Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan
- j. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kepada Anak Panti Asuhan
- k. Pelatihan Foto Grafi Anak Anjal (Anjal) di Hotel Tanjung sebanyak 7 orang

- l. Diklat Program Pencegahan Penanganan PMKS bagi gelandangan dan pengemis sebanyak 41 anak di SKB Kota Malang
- m. Bimbingan Sosial latihan dan latihan keterampilan menjahit di LBK Kota Malang sebanyak 15 Orang bagi penyandang Disabilitas
- n. Pemberian bantuan permakanan untuk (KSA) Panti sebanyak 882 anak
- o. Penanganan PMKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan mengemudi di SIMA bagi anak jalanan sebanyak 15 Anak
- p. Penanganan PMKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan menjahit bagi anak jalanan sebanyak 15 Anak
- q. Penanganan PMKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan menjahit bagi gelandangan dan pengemis sebanyak 20 Anak
- r. Penanganan PMKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan menjahit bagi penyandang cacat sebanyak 15 Anak
- s. Kunjungan Pengurus LPA, Kepada Orang tua anak binaan Komonitas-Griya Baca untuk memfasilitasi biaya pengurusan jenazah dengan memberikan santunan untuk pemulangan korban tenggelam dipantai-Malang Selatan.
- t. LPA sebagai saksi sidang perebutan hak asuh anak dan penyampaian rekomendasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Kasus perebutan Hak Asuh Anak Fina Chrisna Cokroraharjo (Jl. Pondok Blimbing Indah I.3/4 Malang)
- u. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas (Free Sex) peserta 50

Ketua OSIS SMP dan SMA 22. Penyediaan air bersih melalui PDAM dan HIPPAM 2 Kota Malang Tahun 2015

- v. Pengelolaan Limbah Domestik melalaui Bank Sampah sampai tingkat RW
- w. Pengolahan limbah dengan tong komposter di Perumahan : Bantaran Barat, Dinoyo Jl.Keramik, Tlogomas, Purwantoro, Lesanpuro (Jl. Selat Sunda), Bareng, Sukun Pondok Indah Blok L15, Lowokwaru (Jl. Lebaksari)
- x. Pengelolaan Gas Metan di TPA Supit Urang dan Module Sewerage System (Kel. Ciptomulyo, Kel. Mergosono dan
- y. Kel. Jodipan)Program Kali Bersih (Prokasih) melibatkan masyarakat, TNI dan Polri dan Program Sekolah Seribu Bunga

3. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena sifatnya, maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal (Profil anak kota Malang 2013). Anak menurut definisi Konvensi Hak Anak PBB adalah setiap

manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa Konvensi PBB menetapkan usia dibawah 18 tahun sebagai anak-anak, namun tetap memberi ruang bagi masing-masing negara untuk menentukan batasan tersebut (Hidayah, 2009:28).

Menurut Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah seorang laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua.

Menurut UU Peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997 pada pasal 1 ayat (2), anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Anak secara psikososial dapat didefinisikan sebagai individu yang belum dewasa, dalam artian belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial, moral seperti orang dewasa pada umumnya (Sugeng & Fauzik, 2008:2). Anak termasuk individu unik yang mempunyai eksistensi dan memiliki jiwa sendiri, serta mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan iramanya masing-masing yang khas. Masa kehidupan anak sebagian besar berada dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu, keluargalah yang

paling menentukan terhadap masa depan anak, begitu pula corak anak yang terlihat dari perkembangan sosial, psikis, fisik, dan religiusnya (Hidayah, 2009:15).

4. Hak Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak pasal 4 sampai 19 menjelaskan beberapa hak anak yang harus didapatkan oleh anak, diantaranya sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

- e. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- f. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- g. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- h. Setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- j. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- k. setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalagunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam peperangan.
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

5. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya

(Gerungan, 2010). Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama bagi anak, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapat pendidikan dan bimbingan, dikatakan sebagai lingkungan utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Lingkungan keluarga juga bertanggung jawab atas kelakuan, pembentukan kepribadian, kasih sayang, perhatian, bimbingan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak. Lingkungan keluarga juga berpengaruh pada perkembangan dan kepribadian anak (BKBPM Kota Malang). Keluarga adalah kesatuan sosial yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan darah, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.

Keluarga menjalankan beberapa fungsi penting dalam menjalankan kelangsungan hidupnya, fungsi keluarga tersebut diantaranya fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomis. Keluarga tidak hanya menjalankan fungsinya dalam menjalankan kelangsungan hidupnya, melainkan juga menjalankan perannya untuk anggota keluarganya, peran keluarga sangat dominan dalam proses pengasuhan untuk anaknya, berikut ini adalah peran keluarga dalam pengasuhan anak yaitu, terjalinnya hubungan yang harmonis dalam keluarga melalui penerapan pola asuh islami sejak dini, kesabaran dan

ketulusan hati orang tua dapat mengantarkan kesuksesan bagi anak, orang tu wajib mengusahakan kebahagiaan bagi anak dan menerima keadaan anak apa adanya, mendisiplinkan anak dengan kasih sayang serta bersikap adil, komunikatif dengan anak dengan menjawab pertanyaan anak dengan baik dan memahami anak dengan segala aktivitasnya termasuk pergaulannya (Hidayah, 2009:21).

Anak sebagai calon pemimpin masa depan harus berkualitas. Kualitas dari generasi bangsa sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak berada. Lingkungan yang tepat untuk anak dapat mendukung proses tumbuh dan berkembang secara optimal. Pendidikan dan pembelajaran dari lingkungan keluarga sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Lingkungan keluarga menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Pengasuhan dan pendidikan di keluarga sejak dini, bahkan mulai dari dalam kandungan sangat berpengaruh terhadap kualitas fisik, psikis dan mental anak. Anak-anak yang berkembang dengan pola yang tepat dan terencana akan memiliki kepribadian yang baik dan kuat (Sugeng & Fauzik, 2008: 242).

6. Pengertian Pengasuhan Alternatif

Pola asuh yang baik dan sikap positif lingkungan serta penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak akan menumbuhkan konsep diri yang positif bagi anak. pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra konsepsi pernikahan. Memberikan pendidikan terbaik bagi

anak dengan cara memberi contoh keteladanan yang terbaik. Pengasuhan yang diberikan dengan memperhatikan setiap tahap perkembangan anak, maka diajarkan untuk melaksanakan kewajiban pribadi dan sosial (Rifah Hidayah, 2009:15).

Pola asuh anak tidak hanya diberikan oleh orang tua ataupun keluarga inti, melainkan pola asuh anak dapat dilakukan oleh orang lain apabila orang tua atau keluarga inti tidak bisa atau tidak sanggup mengasuh anak dengan berbagai kendala yang dihadapi. Berikut ini pemaparan pengertian pengasuhan alternatif yang diberikan kepada anak, yaitu Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak diluar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan tersebut bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Anak). Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti. Anak yang membutuhkan

pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut :

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam (Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui :

- a. Dukungan langsung dari keluarga atau keluarga pengganti (*family Support*)

- b. Pengasuhan sementara berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak.
- c. Fasilitas dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- d. Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- e. Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus direview secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya atau lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat).
- f. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.
- g. Bayi dan anak sampai umur lima tahun harus selalu ditempatkan dalam pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan hanya ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk periode waktunya sangat singkat dan sebagai tindakan darurat sampai diperolehnya orang tua asuh atau orang tua angkat yang tepat.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak Pasal 37, sebagai berikut :

- a. Pengasuhan anak ditujukan pada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- b. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- c. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- d. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- e. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau diluar Panti Sosial.
- f. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak Pasal 38, sebagai berikut :

- a. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

b. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak (Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).